

KONTRIBUSI MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA CIMAHI

CONTRIBUTION OF SOCIAL CAPITAL IN THE EMPOWERMENT OF THE POOR COMMUNITY IN CIMAHI

Oleh:

Lisdawati Wahjudin

Dosen tetap D III Kepolisian
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana
e-mail :lisda27@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang tentang fenomena permasalahan kemiskinan yang sangat kompleks di Indonesia dan hal ini perlu penanganan yang fokus menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Secara sosiologis kemiskinan memiliki dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberdayakan masyarakat berdasarkan potensi masyarakat itu sendiri. Peneliti mengkaji dan menganalisis kontribusi modal sosial dalam upaya mengentaskan dan memberdayakan masyarakat miskin melalui kelompok lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara cermat dan mendalam tentang kontribusi modal sosial pada fenomena sosial yang ada pada kelompok-kelompok lokal di Kota Cimahi dalam bidang pemberdayaan masyarakat miskin. Teknik pengumpulan data berdasarkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kontribusi modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Cimahi bergantung kepada kerjasama agen yakni pemerintah khususnya program pemberdayaan masyarakat dan peran sasaran yakni masyarakat pada kelompok lokal. Pelibatan indikator modal sosial di antaranya *link* atau jaringan dan *trust* atau kepercayaan antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dan individu dalam kelompok di sekitar sangat mendukung proses pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan atas kebutuhan mensejahterakan masyarakat perlu adanya partisipasi, kerjasama yang baik, menciptakan organisasi yang dapat bersaing di bidang ekonomi. Menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi demi tercapainya masyarakat yang sejahtera dengan berdasarkan saling percaya dan keterkaitan antar individu dan komunitas akan mencapai masyarakat yang lebih baik dan sejahtera di segala bidang.

Kata Kunci: Modal Sosial, pemberdayaan, masyarakat miskin

ABSTRACT

This study aimed to analyze the background of the phenomenon of poverty problems are very complex in Indonesia and this needs to be handling the focus towards better public welfare. Sociologically poverty have a major impact on many aspects of life. One of the efforts is to empower people by the potential of the community itself. Researchers examine and analyze the role of links and trust in an effort to alleviate and empower poor communities through local groups. This study used qualitative methods with the aim of describing and analyzing carefully and deeply about the contribution social capital in the social phenomenon that is on local groups in Cimahi in the field of empowerment of the poor. Data collection techniques based on participant observation, in-depth interviews, and documentation. Results and discussion shows that the contribution social capital in the empowerment of the poor in Cimahi dependent on the government agency cooperation, especially community development programs and the role of the target communities at the local group. The inclusion of a link or network indication and trust or confidence between communities and companies, communities and individuals in a group around a very supportive community empowerment process in the economic, social, and environmental. Based on the needs of the public welfare need their participation, good cooperation, create organisasi that can compete in the economic field. Foster a sense of solidarity in order to achieve a prosperous society on the basis of mutual trust and linkages between individuals and communities will achieve a better society and a prosperous society in all fields.

Keywords: *Social Capital, empowerment, poor people*

I. PENDAHULUAN

Sasaran Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*), adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat dan membangun dunia yang lebih baik pada abad ke-21. Melihat hasil pembangunan di beberapa negara yang belum mencapai target, maka *MDGs* ditransformasikan ke dalam *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Fenomena yang sedang berlangsung bahwa kemiskinan tetap menjadi sebuah permasalahan yang kompleks di Indonesia, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin meningkat. Kesenjangan tingkat kemiskinan antarprovinsi masih perlu ditangani secara efektif. Dari 33 provinsi, 17 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional, sementara 16 provinsi lainnya masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional (Bappenas, 2010:19).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya diarahkan

kepada pengokohan kelembagaan masyarakat khususnya kelompok-kelompok lokal yang menjadi potensi dasar yang ada di masyarakat dengan didukung oleh jaringan dan unsur kepercayaan yang tinggi di dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian pembangunan dapat bersinergis dengan program yang digulirkan pemerintah. Menurut Lawang (2002:63) pelaksanaan pembangunan yang meliputi segi kehidupan, baik politik, ekonomi dan sosial budaya akan berhasil apabila solidaritas sosial tetap terpelihara dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kajian penelitian terdahulu tentang modal sosial dan pemberdayaan masyarakat yang melihat peran modal sosial dalam interaksi individu di dalam keluarga dan dalam kehidupan berorganisasi dilakukan oleh Prayitno (2004) dan Ibrahim (2002); Darmawati (2008) dan Indraddin (2012). Pemanfaatan modal sosial yang ada di masyarakat rural maupun urban masih sebagai *bonding* (pengikat saja) belum sebagai jembatan (*bridging*) yang menghubungkan seluruh potensi warga sehingga kapasitas modal

sosial belum secara optimal dimanfaatkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan oleh LPM Unpad (2008). Kemudian diteliti tentang *trust* oleh Rahardian (2011) bahwa hubungan bisnis yang kooperatif akan tumbuh seiring dengan meningkatnya kepercayaan dan komitmen sehingga *trust* berpengaruh positif.

Unsur terpenting dalam modal sosial adalah kepercayaan (*trust*) yang merupakan perekat bagi langgengnya kerjasama dalam kelompok masyarakat. Dengan kepercayaan (*trust*) orang-orang akan bisa bekerja sama secara lebih efektif (Fukuyama, 2002). Elemen modal sosial yang menjadi pusat kajian Fukuyama adalah kepercayaan (*trust*) karena menurutnya sangat erat kaitannya antara modal sosial dengan kepercayaan. Fukuyama mengurai secara mendalam tentang bagaimana kondisi kepercayaan dalam komunitas di beberapa negara dan mencoba mencari korelasinya dengan tingkat kehidupan ekonomi negara bersangkutan.

Dalam mengkaji sistem-sistem *link* dan *trust*, Coleman (2011:256) membahas komponen dari sistem itu dengan melibatkan relasi dua pelaku maupun tiga pelaku. Coleman (2011:260) menyatakan sistem kepercayaan muncul ketika sejumlah pelaku (sebuah kelompok atau komunitas) terlibat dalam aktivitas yang memberikan hasil yang menjadi kepentingan bersama, dan masing-masing kepentingan tidak mengorbankan kepentingan orang lain agar berpartisipasi dalam aktivitas demi kepentingan umum.

Berbagai uraian tentang hasil penelitian di atas membahas tentang modal sosial, tetapi penelitian yang dikaitkan dengan *link* dan *trust* masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu fokus penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis upaya pemberdayaan masyarakat miskin dengan meneliti kontribusi *link* dan *trust* yakni mengkaji dinamika kelompok lokal (kelompok pengajian, paguyuban, kelompok arisan dan asosiasi tertentu) yang ada dalam suatu komunitas, dengan

menggunakan pendekatan partisipatoris.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan *research questions* yaitu; Bagaimana *link* dan *trust* dapat berkontribusi dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Modal Sosial

Modal sosial yang berkualitas dan tinggi tumbuh dan berkembang didalam masyarakat madani (*civil society*) adalah kelompok-kelompok masyarakat di luar campur tangan pemerintahan formal yang memiliki kemampuan melakukan tata laksana pemerintahan (*self governance*) yang didasari *social trust* dan nuansa demokratisasi yang tinggi (Fukuyama, 1999).

Unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan sosial (*link*) adalah konsep-konsep inti dalam *social capital* (Coleman, 1998:415). Modal sosial menurutnya inheren dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya,

membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi bagi para anggotanya. Demikian juga Fukuyama (1995: vii) menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama di antara para anggota kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama.

2.2 Dimensi Modal Sosial

Modal sosial (*social capital*) berbeda definisi dan terminologinya dengan *human capital* (Fukuyama,2005). Bentuk *human capital* adalah ‘pengetahuan’ dan ‘keterampilan’ manusia. Investasi *human capital conventional* adalah dalam bentuk seperti halnya pendidikan universitas, pelatihan menjadi seorang mekanik atau programmer komputer, atau menyelenggarakan pendidikan yang tepat lainnya.

Bank Dunia (2005) meyakini modal sosial adalah sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang

membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat.

Modal sosial bukanlah sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang (*underpinning*) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas. Yaitu sebagai perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.

2.3 Tipologi Modal Sosial

Dimensi lain yang menarik perhatian adalah yang berkaitan dengan tipologi modal sosial, yaitu bagaimana perbedaan pola-pola interaksi berikut konsekuensinya antara modal sosial yang berbentuk mengikat atau *bonding/exclusive* lebih berorientasi ke dalam lingkungannya sendiri, cenderung konservatif dan lebih mengutamakan *solidarity making* daripada hal-hal yang lebih nyata untuk membangun diri dan kelompok sesuai dengan tuntutan nilai. Kemudian tipe menjebatani atau *bridging/inclusive* biasanya mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kemajuan dan kekuatan masyarakat.

Keduanya memiliki implikasi yang berbeda pada hasil-hasil yang dapat dicapai dan pengaruh-pengaruh yang dapat muncul dalam proses kehidupan dan pembangunan masyarakat.

Inti telaahan terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu kelompok untuk berinteraksi dalam kegiatan sosial dan bekerjasama membangun suatu jaringan (*link*) dan kepercayaan (*trust*).

2.4 Konsep Tentang *Link* dan *Trust*

Dalam mengkaji sistem-sistem *link* dan *trust*, Coleman (2011:256) membahas komponen dari sistem itu dengan melibatkan relasi dua pelaku maupun tiga pelaku. Coleman (2011:260) menyatakan sistem kepercayaan muncul ketika sejumlah pelaku (sebuah kelompok atau komunitas) terlibat dalam aktivitas yang memberikan hasil yang menjadi kepentingan bersama, dan masing-masing kepentingan tidak mengorbankan kepentingan orang lain agar berpartisipasi dalam

aktivitas demi kepentingan umum.

Selanjutnya Fukuyama (1995: xiii) mendefinisikan *trust* sebagai istilah kepercayaan sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama-sama dalam satu komunitas itu.

Seperti yang dikemukakan Putnam (1999:137) pertanyaan standar di Amerika tentang *social trust* dan *honesty* dari beberapa dekade yang ada umumnya digeneralisasikan bahwa respon kepercayaan mereka sedikit sekali. Kemudian pada responden ditanyakan kembali tentang *trust* dapat disimpulkan bahwa laporan responden menyatakan bahwa kejujuran adalah sesuatu yang langka di samping faktor pengetahuan atau perilaku orang yang tidak pernah berubah.

Demikian pula Peny Chalid menyatakan bahwa *trust* secara sederhana dapat diartikan sebagai kepercayaan yang tumbuh dari proses interaksi sosial dan menuntut adanya tanggung jawab moral

(2009:12). Selain itu, *trust* terbentuk karena adanya pertimbangan rasional kalkulatif yang melatarbelakanginya.

Seperti yang dikutip pada Fukuyama bahwa *trust* juga melekat pada personal dan institusi yang melingkupinya (1995:20) dinyatakan bahwa *trust* yang dibangun atas dasar kekeluargaan terjadi pada tipe masyarakat *family society*. Pada tipe masyarakat ini *trust* diberikan kepada individu yang memiliki hubungan primordialistik. Masyarakat seperti ini tidak memiliki basis kepercayaan terhadap masyarakat kelompoknya. *Trust* yang diberikan relatif berada pada level rendah atau *low trust* karena hanya orang-orang yang berada dalam lingkaran keluarga, kerabat, klan, agama, atau suku sajalah yang dapat dipercaya, karena kelompok masyarakat ini hampir tidak mengenal asosiasi yang dibentuk secara sukarela.

2.5 Kajian Link dan Trust dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Oekan S Abdoellah (2016:17) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan tanda bahwa

pembangunan yang dilakukan gagal mencapai tujuannya. Penduduk yang termasuk kategori miskin dapat dipastikan mengalami kesulitan memperoleh akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan maupun papan. Kemiskinan juga terkait erat dengan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan keadilan yang tidak merata .

Hal di atas sangat berkaitan dengan bagaimana usaha meningkatkan keberadaan masyarakat miskin dengan memberdayakannya. Beberapa unsur yang merupakan pemberdayaan masyarakat adalah sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peranan penting adalah kemauan masyarakat untuk secara terus menerus proaktif baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan kerja sama maupun penciptaan kreasi dan ide-ide baru.

Hasbullah (2006) menyatakan dimensi inti dari *link* dan *trust*

terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama itu diwarnai oleh interelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan itu akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan di atas prinsip sikap-sikap yang proaktif membuat jalinan yang lebih partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling mempercayai dan memperkuat nilai dan norma yang mendukungnya.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat miskin, kepercayaan atau *trust* sebagai unsur terpenting merupakan perekat bagi langgengnya kerja sama dalam kelompok masyarakat. Dengan *trust* orang-orang dapat bekerja sama lebih efektif (Fukuyama: 2002). Demikian *link* atau jaringan dapat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan yang tercakup dalam berbagai program

pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini diukung oleh berbagai pihak terkait dan *stakeholder* demi tercapainya sasaran program pemerintah dengan melihat unsur-unsur budaya dan kearifan lokal setempat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang peran *link* dan *trust* dalam pemberdayaan masyarakat miskin ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali, memahami, mengkaji, dan menganalisis secara cermat dan mendalam tentang fenomena sosial tentang *link* dan *trust* pada kelompok-kelompok lokal yang berada di kota Cimahi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penentuan informan ditentukan sesuai dengan kriteria nara sumber-nara sumber yang dianggap mengetahui, mengalami, dan memahami proses pemberdayaan masyarakat dan kontribusi *link* dan *trust*. Penentuan informan berdasarkan *purposeful sampling method* (metode sampling bertujuan) adalah sebagai berikut: 1) Komponen formal yaitu tokoh organisasi dalam

program pemberdayaan masyarakat. Para pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan kegiatan masyarakat di wilayah Cimahi khususnya di Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Cibabat adalah bagian pemberdayaan masyarakat kecamatan, Asisten perkotaan PNPM Mandiri Kota Cimahi.2) Komponen informal; tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam kegiatan kewanitaan di kelurahan dan kelompok yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, di antaranya adalah kelompok PEKA (Pemberdayaan perempuan yang bertindak sebagai kepala keluarga karena suami meninggal atau alasan lainnya).

Adapun teknik pengumpulan data dengan menganalisis dan mendeskripsikan peran *link* dan *trust* melalui :1) Pengamatan terlibat (*participation observation*) adalah cara mengumpulkan data yang digunakan sejak turun lapangan, dengan cara bergaul dan membaaur, berinteraksi dan berkomunikasi dengan bahasa yang mereka gunakan. 2) Wawancara mendalam

kepada tokoh formal dan informal seperti kelompok aktivis remaja pada pengelolaan bidang ekonomi. 3) Studi dokumentasi yaitu dengan melakukan pengumpulan data oleh penulis dengan menelaah beberapa dokumen dalam mengkaji analisis untuk kepentingan penulisan di lapangan. 4) Triangulasi data dilakukan dengan pengumpulan data berbeda pada berbagai informan yang berbeda.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme kontribusi *link* dan *trust* pada penelitian ini adalah sebagai berikut ; pada tahap awal pelaksanaan program di lokasi baru, para pendamping dan fasilitator berkewajiban melakukan proses pembelajaran masyarakat agar mereka mampu melakukan tahap kegiatan di wilayahnya atas kesadaran kritis terhadap alasan mengapa dan untuk apa kegiatan itu harus dilakukan; (1) Tahap persiapan adalah melalui sosialisasi dan pemetaan sosial yang bertujuan mendapatkan gambaran dinamika sosial di masyarakat dan penyebaran informasi tentang adanya program

kegiatan di kelurahan Leuwigajah dan Cibabat; (2) Pada tahap berikutnya, siklus pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya dan dilembagakan oleh masyarakat sendiri yang dipimpin oleh BKM; (3) Tahap perencanaan yaitu dengan merefleksikan perkara kritis sebagai prioritas program. Hal yang dilakukan di Kelurahan Leuwigajah dan Cibabat adalah refleksi kemiskinan; (4) Proses selanjutnya adalah pemetaan swadaya yang bertujuan menghasilkan relawan yang mampu menganalisis masalah dengan potensi masyarakat dengan membangun kesadaran akan realita persoalan dan potensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta nilai-nilai masyarakat di Kelurahan Leuwigajah dan Cibabat. (5) Pengorganisasian masyarakat yang menghasilkan kriteria kepemimpinan yang bermoral dan menemukan orang-orang yang tulus demi terbentuknya lembaga kepemimpinan yang representatif dan mengakar. Selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja program menengah dan tahunan yang berorientasi kepada penanggulangan kemiskinan;

(6) Tahapan pelaksanaan kegiatan ini mencakup kegiatan yang berorientasi pada siklus rebug kesiapan masyarakat, pemetaan swadaya, pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat dari stimultan bantuan langsung; (7) Tahap pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk terbangunnya kepedulian masyarakat untuk memajukan dan memantau kemajuan program secara berkala dan mandiri serta menjangkau kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat demi terbangunnya pengendalian sosial. Tahap evaluasi ini bertujuan mengetahui kualitas proses dan hasil program per tahap evaluasi yang sesuai dengan pedoman peraturan dan nilai-nilai setempat.

Bentuk kegiatan pada bidang pemberdayaan ekonomi di antaranya Program PEKKA (Pemberdayaan Kepala Keluarga Perempuan) dengan jumlah peserta 50 orang Ibu-ibu di Kelurahan Leuwigajah dan jenis kegiatan: pelatihan menjahit, memasak, pelatihan wirausaha.

Terjadinya partisipasi yang tinggi untuk menjadi relawan dalam mengembangkan pelatihan, penulis melihat proses *link* sebagai berikut terbentuk asosiasi baru berdasarkan kepentingan bersama untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pada khususnya kemudian pada *trust* adanya saling percaya antara peserta pelatihan dengan instruktur dari pemerintah kota Cimahi.

Prinsip pengelolaan bidang sosial di masyarakat diatur dalam ketentuan program pemerintah yang disosialisasikan dengan prinsip menanggulangi dan dilaksanakan di seluruh wilayah Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Leuwigajah. Bentuk pemberdayaan di bidang sosial penulis uraikan sebagai berikut:

Kelurahan Leuwigajah dengan penerima raskin di Kelurahan Leuwigajah berjumlah 1565 KK. Jatah beras per bulan 15 kg/KK; penerima Bantuan Siswa Miskin sejumlah 1419 KK dengan rincian distribusi per tahun untuk siswa SD Rp 425.000,- SMP Rp575.000,- dan SMA Rp700.000,-; penerimaan Bantuan Tunai Langsung sebanyak

1565 KK sebesar Rp300.000,- diberikan tiga bulan sekali, program KUBE sebanyak 113 KUBE kelurahan dengan jumlah peserta 10 orang/KK dari masyarakat miskin penerima manfaat. Terlihat proses evaluasi *link* sebagai berikut kerjasama antara pembagian pemberdayaan masyarakat dengan Ibu-ibu PKK kelurahan, kerjasama pengelolaan BSM antar keluarga dan warga penerima manfaat, partisipasi pada pemberian informasi, kerjasama antara peserta dan pelatih keterampilan dalam pembentukan kelompok. Terjadi peningkatan kepedulian antar anggota KUBE dengan masyarakat sasaran, adanya pertukaran informasi antara peserta dan instruktur pada proses pelatihan dan evaluasi kegiatan. Pada *trust* terjadi kejujuran individu pada pengelolaan raskin, penerima bertanggung jawab. Terjadi kejujuran individu pada pengelolaan raskin, penerima bertanggung jawab terhadap dana yang diberikan.

Kelurahan Cibabat Penerima raskin di Kelurahan Cibabat berjumlah 1422 KK dengan jatah

beras per bulan 15 kg/KK. Penerima Bantuan Siswa Miskin sejumlah Penerimaan Bantuan Siswa Miskin sejumlah 1422 KK, Penerima Bantuan Tunai Langsung sebanyak 1422 KK, diberikan tiga bulan sekali. Program KUBE sebanyak 85 KUBE kelurahan dengan jumlah peserta 10 orang/KK dari masyarakat miskin penerima manfaat bagian pemberdayaan masyarakat dengan Ibu-ibu PKK Kelurahan. Kerjasama Pengelolaan BSM antar keluarga dan warga penerima manfaat. Partisipasi pada pemberian informasi penerima BLT secara faktual di lingkungannya. Pada proses *link* kerjasama antara peserta dan pelatih keterampilan dalam pembentukan kelompok. Terjadi peningkatan kepedulian antar anggota KUBE dengan masyarakat sasaran, terjadi kejujuran individu pada pengelolaan raskin. Pada proses *trust* penerima bertanggung jawab terhadap dana yang diberikan. Pelatih bertanggung jawab pada proses pendampingan dan pelatihan pada kegiatan menjahit.

Pembangunan pemberdayaan masyarakat berbentuk fisik berupa *Rutilahu* (Rumah tinggal layak huni). Pembangunan rumah layak huni ini bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam hal ini Pemkot Cimahi. Langkah awal adalah pendataan rumah-rumah tidak layak huni di setiap kelurahan.

Kelurahan Leuwigajah Rumah percontohan Propinsi di wilayah Cimahi sebanyak 10 rumah dengan jumlah bantuan Rp 15 jt/KK, Pembangunan *Rutilahu* (Rumah Tidak Layak Huni) Kelurahan Leuwigajah, sejumlah 41.000 rumah dengan jumlah bantuan Rp350.000,00/KK/enam bulan pembangunan berjalan. Pembangunan prasana air bersih dan sumur resapan didistribusikan kepada lima RW yang membutuhkan penampungan air. Tampak kerjasama antara bagian pemberdayaan masyarakat, BKM dan para relawan kelurahan partisipasi antara penerima manfaat, relawan dan pihak pemerintah pada tahap persiapan sampai tahap penyelesaian pembangunan, saling percaya antar relawan untuk bekerjasama

membangun *rutilahu*. Pertanggungjawaban laporan keuangan secara periodik dari kelurahan kepada pihak pemerintah kota. Menumbuhkan solidaritas yang tinggi antara masyarakat pengguna air bersih dan pihak BKM.

Pembangunan *Rutilahu* (Rumah Tidak Layak Huni) Kelurahan Cibabat sejumlah 23.000 rumah dengan jumlah bantuan Rp.350.000,00/KK/enam bulan pembangunan berjalan. Pembangunan prasana air bersih dan sumur resapan didistribusikan kepada 5 RW yang membutuhkan penampungan air. Partisipasi antara penerima manfaat, relawan dan pihak pemerintah pada tahap persiapan sampai tahap penyelesaian pembangunan. Nampak proses *link* dengan tingkat partisipasi antara penerima manfaat, relawan dan pihak pemerintah pada tahap persiapan sampai tahap penyelesaian pembangunan. Pertanggungjawaban laporan keuangan secara periodik dari kelurahan kepada pihak pemerintah kota. Menumbuhkan solidaritas yang tinggi antara

masyarakat pengguna air bersih dan pihak BKM.

Upaya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat yang bermukim di perkotaan menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini dapat terlihat pada beberapa program yang dikururkan seperti Bantuan Tunai Langsung, PNPM dan juga KUBE. Program-program pemerintah tersebut untuk memberi akses baik secara ekonomi dan juga akses terhadap sumber penghidupan yang sifatnya terbatas.

Namun, tidak saja pemerintah yang memberikan program pemberdayaan pada masyarakat miskin, akan tetapi masyarakat juga tampaknya memiliki cara sendiri untuk membentuk program pemberdayaan dengan cara penguatan kapasitas yang mereka miliki. Penguatan kapasitas tersebut seperti membentuk asosiasi lokal untuk penguatan ekonomi dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses yang sifatnya terbatas, karena kemiskinan bukan saja ketidakmampuan untuk mengakses ekonomi tetapi juga

ketidakmampuan untuk mengakses sumber-sumber penghidupan lainnya.

Sehubungan dengan itu, maka pemberdayaan bagi masyarakat menjadi penting meningkat bahwa kelompok-kelompok tertentu memiliki beragam ketrampilan dan pengetahuan, namun karena ketidakmampuan untuk mengakses sumber-sumber penghidupan maka potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat tersebut tidak dioptimalkan sehingga bukan menjadi modal bagi masyarakat justru pengetahuan dan ketrampilan tersebut menjadi hal yang tidak berguna (Fukuyama, 2000). Karena itu, pemberdayaan pada masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Cimahi adalah salah satu daerah yang distimulus untuk berkembang dengan cara pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan berasal dari pemerintah seperti bantuan tunai langsung (BLT), PNMP mandiri, KUBE. Selain itu, terdapat beberapa wakil perusahaan yang berkontribusi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat,

di antaranya CV Mandiri, PT. SMM, PD. Surya, PD. KWSG dalam pengembangan usaha mikro kecil dengan pemberian dana sebesar Rp6.200.000,- sebagai sumbangan yang akan dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan.

Program-program pemerintah tersebut berjalan sesuai dengan administrasi yang jelas. Dalam hal ini dimulai dari mekanisme yang bertahap mulai dari pengenalan atau sosialisasi, pelaksanaan, sampai pada kontrol program tersebut. Program pemerintah tersebut diberikan secara formal dan direspons oleh masyarakat juga secara formal, sehingga pemantauan pelaksanaannya dapat diketahui oleh masyarakat Cimahi.

Tampaknya pemberdayaan masyarakat Cimahi bukan saja berasal dari pemerintah, akan tetapi pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat Sumodiningrat (2005) bahwa pemberdayaan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat apabila masyarakat itu sendiri yang menginisiasi

pemberdayaan. Bentuk pemberdayaan dari masyarakat tersebut adalah arisan, simpan pinjam yang semuanya dibentuk oleh masyarakat lokal Cimahi.

Program pemberdayaan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat tersebut merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Cimahi. Bagi masyarakat Cimahi modal sosial memiliki kontribusi yang penting untuk menjalin *networking*. Mengacu pada pendapat Fukuyama (2000) bahwa modal sosial itu bukan saja modal berupa ekonomi tetapi juga modal kultural dan norma yang ada. Dengan demikian, masyarakat Cimahi memiliki modal budaya yakni memiliki rasa persaudaraan yang menurut istilah Durkheim adalah solidaritas. Bagi Durkheim program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat Cimahi tersebut adalah bentuk solidaritas organik, karena solidaritas yang berasal dari program pemerintah awalnya tidak saling mengenal namun hanya dilandasi rasa persamaan atau rasa ingin maju bersama. Sedangkan asosiasi lokal yang berasal dari masyarakat Cimahi

itu adalah bentuk solidaritas dari mekanik. Solidaritas tersebut berlandaskan pada upaya warga untuk memperkuat rasa persaudaraan karena mereka mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Pada masyarakat Cimahi, kedua bentuk solidaritas tersebut menjadi satu kesatuan karena baik program pemerintah dan program dari masyarakat itu sendiri adalah dua bentuk program yang dibutuhkan di dalam pemberdayaan masyarakat. Karena itu, kedua solidaritas tersebut menjadi modal yang kuat untuk pemberdayaan pada masyarakat Cimahi.

Data hasil temuan di lapangan mengenai kontribusi *link* dan *trust* bahwa pembangunan berbasis *link* dan *trust* berhasil baik, hal ini ditunjukkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan dalam rangka pemberdayaan yang merupakan program yang berkelanjutan dan dikoordinasikan dengan baik kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dalam hal ini diperlihatkan dengan adanya sinergitas antara yang dilakukan oleh

pemerintah dengan masyarakat. Program-program yang diorientasikan untuk menemukan akar permasalahan setelah dilakukan rembug warga di setiap awal program kegiatan, pada pelaksanaan, dan pada tahap evaluasi kegiatan. Sehingga program-program yang dilaksanakan benar-benar diyakini dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Sosialisasi program yang berbekal pemahaman lembaga pelaksana lapangan disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat sekitar menjadi bagian tantangan tersendiri bagi pelaksana di lapangan yang membutuhkan kesabaran tinggi demi menumbuhkan kepercayaan dan kerjasama yang harmonis demi terwujudnya program kegiatan yang pada akhirnya dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kemiskinan pada masyarakat perkotaan disebabkan kurangnya

akses masyarakat pada sumber kehidupan. Keterbatasan tersebut disebabkan tidak saja masyarakat kurang pengetahuan dan keterampilan tetapi juga disebabkan oleh struktur yang membentuk mereka untuk tidak mempunyai akses. Sehubungan dengan itu, program pemberdayaan menjadi cara untuk mengentaskan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan pada masyarakat kota dilakukan tidak saja dari program pemerintah tetapi juga melalui asosiasi lokal yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Keduanya memiliki *link dan trust* pada pelaksanaannya agar terjalin *networking* yang lebih luas. Sehubungan dengan itu, modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari masyarakat memiliki kontribusi untuk pengentasan kemiskinan pada masyarakat kota.

5.2 Saran

Pemerintah diharapkan dapat memberikan akses jaringan seluas mungkin terutama keterlibatan

komunitas lokal untuk pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan dengan berbagai upaya partisipatif terhadap pelaku program yaitu masyarakat umum. Tetapi hal ini harus mendapat pengawasan dari pihak terkait yaitu penyelenggara program pemberdayaan dan stakeholders yang menangani bidang pemberdayaan agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Membangun kerjasama antara *stakeholder* dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dengan membentuk suatu organisasi/lembaga yang akan memberikan harapan bagi orang-orang miskin dan secara efektif mempromosikan solidaritas dan perasaan identitas kelompok yang sama dengan kelompok masyarakat yang lebih luas untuk menanggulangi budaya miskin, mengubah pola pikir masyarakat miskin menjadi maju yang dapat membuka diri dengan kepentingan sosial, ekonomi, maupun kegiatan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Oekan S. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Baddaruddin.2006. Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam Komunitas (Studi pada Komunitas Petani Karet di Kab. Pasaman Sumatra Barat) hlm. 118-125. *Jurnal Wawasan* Oktober 2006. Vol IV No. 2.
- Bappeda Kota Cimahi . 2012. *Kajian Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Bappeda Cimahi*.
- Bappenas. 2010. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010*. Kementrian perencanaan Pembangunan Nasional.
- Brewster. 1998. *A Theory of Trust: An Exposition of Francis Fukuyama's Trust*: Paper Presented at The Annual Meeting of Southwestern Sociological Association. March 18-21, 1998. Corpus City. Texas.
- Chalid, Peni. 2009. *Trust Modal Transaksi Ekonomi dan Relasi Sosial*. Jakarta: CSES
- Creswell. John. W. 2010. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Coleman, S. James. 2011. *Dasar-Dasar Teori Sosial. Foundation of Social Theory*. Bandung: Nusa Media.
- Faturochman. 2007. *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas gajah Mada.
- Field, John. 2004. *Sosial Capital. Key Ideas*. New York: Routledge.

- Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Fukuyama, F. 1999. *The Great Disruption: human nature and the reconstitution of social order*. New York: Free Press.
- Hasbullah. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)* . Jakarta: United Press.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* .Bandung : Humaniora Utama
- Kartasasmita. Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi*. Pidato pengukuhan Guru Besar Universitas Brawijaya. Malang.
- Kementerian. PU 2012. *Pedoman Teknis Pengamanan Sosial dan Lingkungan*. Jakarta. Dirjen Cipta Karya. Kementerian PU.
- _____. _____. *Pedoman Teknis Kegiatan Tridaya (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. Jakarta. Dirjen Cipta Karya Kementerian PU.
- Korten. David C. and Rudi Klauss (ed). 1984. *People Centered Development*. USA: Kumarian Press.
- Lawang Robert. 2002. Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kapital Sosial di Tingkat Desa dan Kelurahan dalam *Jurnal Masyarakat* No. 10 hlm. 44-52
- LPM Unpad. 2008. *Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat*.
- Putnam, R.D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Ritzer George, Douglas C. Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Jakarta: Prenada Media Group.

- Soleh, Habib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.
- Suharto ,Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan..* Bandung: Alfabeta.
- Soetrisno, Loekman.1997. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta: Refika Aditama
- Thierry van Bastelaer. 2001. *Understanding and Measuring Social Capital : A Synthesis of Findings and Recommendations from The Social Capital Initiative*. Social Capital Initiative Work Paper No. 24. USA. The World bank
- Tjiptoherijanto, Priyono. 1998. *Pemberdayaan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Vitra Putra Bangsa.